



LMCK

Laporan Monitoring Capaian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat

TAHUN
2023
• Triwulan ke III •



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

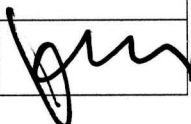
Kalimantan Barat

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. Zaenal Abidin, S.Tr.Tra	Analisis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan SDP	17 - 10 - 2023	
		2. Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf Pelaksana		
2.	Diperiksa	Sofyan Hidayat, S.E	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan	17 - 10 - 2023	
3.	Disetujui	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	17- 10 - 2023	



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. Zaenal Abidin, S.Tr.Tra	Analisis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan SDP	17 - 10 - 2023	
		2. Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf Pelaksana		
2.	Diperiksa	Iwan Sarwoko, S.Si.T., M.T	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan	17 - 10 - 2023	
3.	Disetujui	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	17 - 10 - 2023	



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat

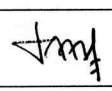


**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMETERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. Zaenal Abidin, S.Tr.Tra	Analisis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan SDP	17 - 10 - 2023	
		2. Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf Pelaksana		
2.	Diperiksa	Dodi Frenky, S.Si.T	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan	17 - 10 - 2023	
3.	Disetujui	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	17 - 10 - 2023	



Kata Pengantar



KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2023. Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Pontianak, Oktober 2023

Kepala Balai,

**I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001**



Ringkasan Eksekutif



RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019- 2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2023, ditetapkan 5 (Lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.



Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja triwulan III Tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sudah baik. Dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi 75 (target 100%) tercapai 75%;
2. IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi 2 lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100%;
3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan terealisasi 75 (target 100%) tercapai 75%;
4. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 9 lokasi (target 9 Lokasi) tercapai 100%;
5. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A terealisasi 90 (target 90%) tercapai 90%;
6. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi 90 (target 90%) tercapai 100%;
7. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 60 (target 80%) tercapai 75%;
8. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 60 (target 80%) tercapai 75%;
9. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 orang (target 600 Orang) tercapai 0%;
10. IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 75 (target 100%) tercapai 75%;
11. IKK 7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP terealisasi 3 lokasi (target 3 lokasi) tercapai 100%;
12. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi dengan nilai 70 (target 90 nilai) tercapai 77,77%;
13. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi dengan nilai 70 (target 90 nilai) tercapai 77,77%.

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 81,6% dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesign sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), Pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
I.2.1 Tugas Pokok.....	2
I.2.2 Fungsi	2
I.2.3 Bagan Struktur Organisasi	3
I.3 Sumber Daya Manusia.....	5
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	5
I.4.1 Potensi	5
I.4.2 Permasalahan	6
I.5 Sistematika Laporan.....	10
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	11
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	14
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	19
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	19
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	21
II.2.1 SK1 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat	25
II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	31
II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transpotasi Darat	34
II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	40
II.2.5 SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	42
II.3 Realisasi Anggaran	44



II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023	44
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	46
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
BAB III PENUTUP	51
III.1 Penutup	51
III.1.1 Ringkasan Capaian	51
III.2 Hasil Evaluasi Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	51
LAMPIRAN.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia.....	5
Tabel I. 2 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	11
Tabel I. 3 Uraian rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	14
Tabel I. 4 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel II. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023.....	23
Tabel II. 2 SK1 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat.....	25
Tabel II. 3 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	31
Tabel II. 4 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.....	34
Tabel II. 5 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	40
Tabel II. 6 SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	42
Tabel II. 7 Alokasi Anggaran Tahun 2023	44
Tabel II. 8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2023.....	45
Tabel II. 9 Realisasi Anggaran Tahun 2023	46
Tabel II. 10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023	47
Tabel II. 11 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023.....	47
Tabel II. 12 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.....	48
Tabel II. 13 Analis dan Efisiensi Penggunaan SDM.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B	3
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023;**
- 2. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023;**
- 3. Rencana Aksi Tahun 2023;**
- 4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023**
- 5. Lain - lain yang dianggap perlu.**



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang tertuang dalam rencana Lima Tahun 2020-2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menemukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK).

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Monitoring Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor



12 Tahun 2016 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan capaian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2023 tiap Triwulan.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

I.2.1 Tugas Pokok

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyebrangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

I.2.2 Fungsi

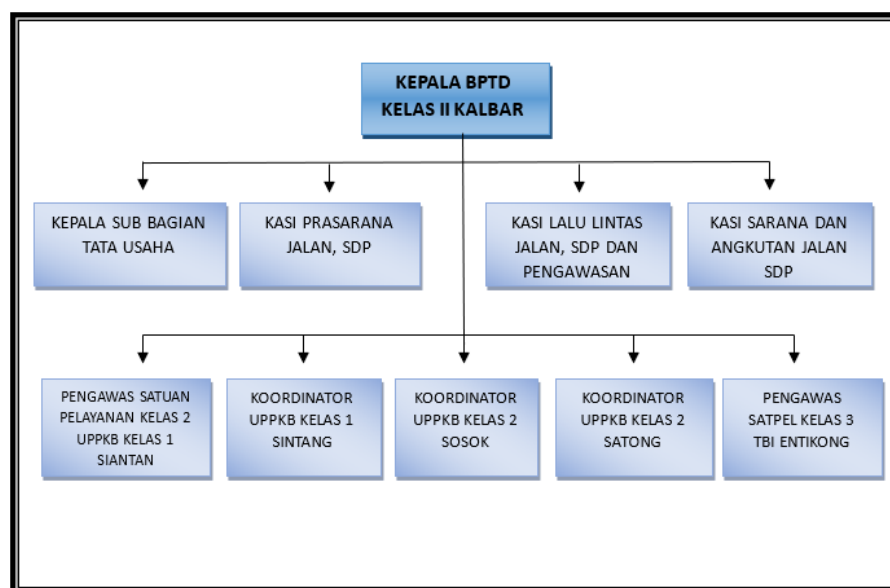
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, BPTD Kelas II Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyebrangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyebrangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;

- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyebrangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.2.3 Bagan Struktur Organisasi

Kerangka Kelembagaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya



manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi public, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoprasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, Pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda da Pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan.

c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang bersubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalandan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyebrangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyebrangan.

d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoprasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi menajamen lalu lintas sungai, danau, dan penyebrangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyebrangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyebrangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkuta jalan, sungai, danau, dan penyebrangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan



persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau dan penyebrangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau dan penyebrangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyebrangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau dan penyebrangan.

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat menaungi sebanyak 279 Pegawai, yang terdiri dari PNS sebanyak 67 orang dan PPNNP sebanyak 212 dengan rician sebagai berikut:

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia

No	Satuan Pelayanan	Jumlah PPNNP (orang)	Jumlah PNS (orang)	Jumlah Total (orang)
1	Kantor Induk BPTD Kelas II Kalimantan Barat	51	48	99
2	Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang	65	4	69
3	UPPKB Siantan	40	6	46
4	UPPKB Sosok	9	1	10
5	UPPKB Sintang	10	4	14
6	UPPKB Satong	11	1	12
7	UPPKB Sekadau	1	0	1
8	UPPKB Singkawang	2	0	2
9	TBI Entikong	12	1	13
10	PLBN Entikong	2	0	2
11	PLBN Aruk	1	2	3
12	PLBN Nanga Badau	2	0	2
13	Pelabuhan Penyebrangan Sintete	4	0	4
14	Pelabuhan Rasau Jaya	2	0	2

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan



tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat.

Potensi pengembangan pada bidang Transportasi darat adalah sebagai berikut :

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;

Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada (Bapedal, Bapedalda atau lembaga teknis lainnya) baik di pusat maupun di daerah. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif untuk melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan skala operasi obyek pemantauan

I.4.2 Permasalahan

a. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan



transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.

2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal Karena keterbatasan fisik/peralatan SDM dan sistem manajemen;
 - b) Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
 - c) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antar kota antar provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;
 - d) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - e) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - 1) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - 2) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
 - 3) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - 4) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
 - 5) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.
 - f) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
 - g) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - 1) Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;



- 2) Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 3) Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
- 4) Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- 5) Belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ. Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan perintis dan perbatasan untuk Perum Damri);
- 6) Kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan "road pricing" yang belum tepat sasaran;
- 7) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- 8) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.



- b. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 1. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
 - 2. Masih belum tersusunnya data mengenai sarana prasarana transportasi penyeberangan;
 - 3. Ketersediaan data trayek transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik;
 - 4. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
 - 5. Belum dilaksanakannya penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;
 - 6. Belum adanya buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- c. Permasalahan Transportasi Perkotaan
 - 1. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - 2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - 3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
 - 4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
 - 5. Kemacetan lalu lintas;
 - 6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
 - 7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.
- d. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
 - 1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
 - 2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
 - 3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
 - 4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.



I.5 Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Format Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan-an ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, struktur organisasi serta penjelasan singkat mengenai perjanjian kinerja organisasi.

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi pada periode triwulan dimaksud untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan dimaksud, dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan;
3. Capaian lainnya (bila ada);
4. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja Tahunan Tahun 2023;
2. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Tahun 2023;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023;
5. Lain-lain yang dianggap perlu.

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I. 2 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	REALISASI 2020-2024	TARGET 2020-2024
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	REALISASI 2020- 2024	TARGET 2020- 2024
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
	keterpaduan antarmoda transportasi		nasional			
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	11
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	100
		IKK3.2	Persentase	%	80	100



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	REALISASI 2020- 2024	TARGET 2020- 2024
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
			pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat			
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Lokasi	600	1000
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	100
WA		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan	Nilai	90	100



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	REALISASI 2020- 2024	TARGET 2020- 2024
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
	Perhubungan Darat Akuntabel		Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat			

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Dalam mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2023. Berikut adalah tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat:

Tabel I. 3 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan	%	90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
			Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP		
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat merupakan kontrak kinerja antara BPTD Kelas II Kalimantan Barat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung



melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas belum ada realisasi dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2023 sebesar Rp. 1.230.686.261 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80



			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
			IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90



BAB II

Akuntabilitas Kinerja

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang



direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$



Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka diperoleh data Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah sebesar **81,6%**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran program sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**Tabel II. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023**

SASARAN PROGRAM /		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM				T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					30,55%		62,5%		87,5%		
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	25	25%	100	50	50%	100	75	75%
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2	1	50%	2	1	50%	2	2	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	25	25%	100	50	50%	100	75	75%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	9	2	22,22%	9	9	100%	9	9	100%
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					22,22%		75%		100%		
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90	90	20	22,22%	90	90	100%	90	90	100%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	90	20	22,22%	90	45	50%	90	90	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					21,66%		43,33%		65%		
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	20	25%	80	40	50%	80	60	75%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80	80	20	25%	80	40	50%	80	60	75%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600	600	0	0%	600	0	0%	600	0	0%
IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	25	25%	100	50	50%	100	75	75%
IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	3	1	33,33%	3	2	66,66%	3	3	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					22,22%		50%		77,77%		
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	90	20	22,22%	90	45	50%	90	70	77,77%



SASARAN PROGRAM /			SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM					T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					22,22%				50%				77,77%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		Nlai	90	90	20	22,22%	90	45	50%	90	70	77,77%	
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						22,77%				56,16%				81,6%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						23,77%		56,16%			81,6%			
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						0		2			5			
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						13		11			8			

II.2.1 SK1 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi dalam rangka mewujudkan konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, BPTD Kelas II Kalimantan Barat menggunakan 6 (tiga) IKK, yaitu :

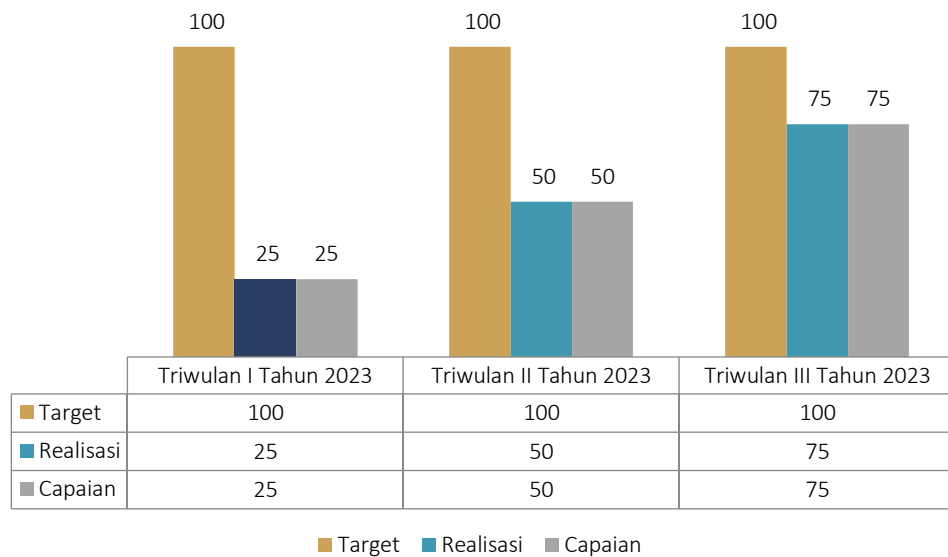
1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. Jumlah terminal Tipe A dan terminal barang yang beroperasi
3. Jumlah penyediaan Fasilitas pendukung dan integritas moda
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

Tabel II. 2 SK1 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	TRIWULAN III		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK1	Meningkatnya Konektifitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				87,5%	
IKK 1.1	Persentase peaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	75	75%
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%
IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	75	75%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	9	9	100%

1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
Capaian kinerja jumlah trayek keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.
Untuk capaian Kinerja Program Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan Angkutan Umum berupa: AKAP, Keperintisan Jalan, Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis).
Kawasan Strategis Nasional terdiri dari: 1 (Satu) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 2 (Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK).

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan III Tahun 2023



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak **3 (Tiga) trayek Strategis** yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana. Dari total trayek tersebut, 3 (tiga) trayek tersebut pada tahun ini akan melayani trayek prioritas nasional, dan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana yang di tuangkan dalam Renstra BPTD.

- 1) Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023 Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, target trayek pelayanan Angkutan Jalan Perintis pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah sebesar 3 trayek dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2023 adalah sebanyak 3 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 1 (satu) trayek pada **2 (dua) Kawasan** Strategis Nasional.

a) Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014



tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, sebanyak 4 (empat) trayek telah dilayani ALBN. Dari jumlah trayek tersebut terdapat 2 (dua) trayek yang melayani 1 (satu) Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel I. 5 Trayek Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)

No.	Trayek	Kawasan Prioritas Nasional
1.	Pontianak - Kuching	KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan)
2.	Pontianak - Bandar Seri Bengawan	

b) Angkutan Jalan Perintis

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4442/AJ.005/DRJD/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3635/AJ.204/DRJD/2019 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4442/AJ.005/DRJD/2019 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2020, sebanyak 4 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis. Dari jumlah trayek tersebut terdapat trayek yang melayani 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional.

c. *Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang*

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

- 1) Melakukan Pembukaan Lintas Baru untuk daerah daerah kawasan Strategis Nasional untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintah untuk memajukan kawasan tersebut.
- 2) Melakukan pembangunan Prasarana Terminal Penumpang dan Terminal Barang Internasional berdasarkan Rencana Induk yang telah disusun.

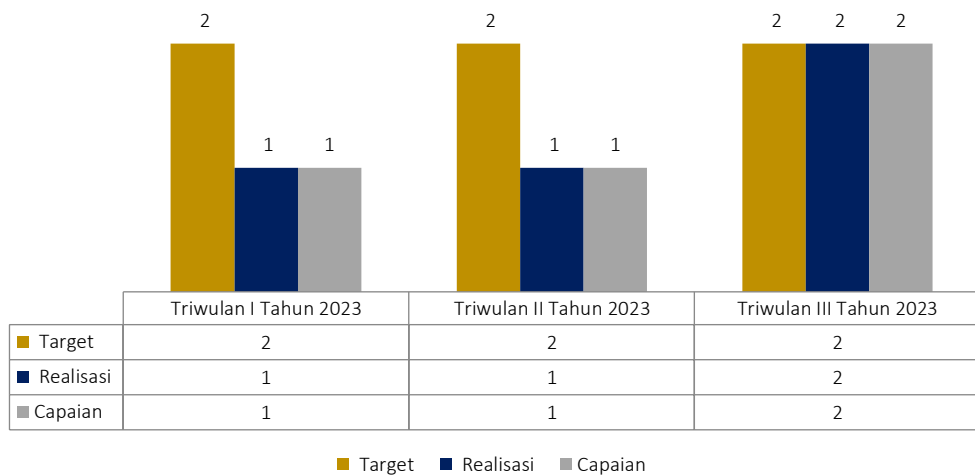


3) Mewujudkan Pembangunan terpadu pada moda Transportasi Lainnya.

2. IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
Indikator kinerja program persentase capaian Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi capaian dihitung dalam satu tahun kegiatan.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2023

Capaian persentase jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi capaiannya sebesar 2 Lokasi maka capaian kinerjanya di awal pun sebesar 100% di Triwulan III. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian berikut.



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian perbandingan Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi pada triwulan III yaitu sebesar :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian Pencapaian pada indikator kegiatan ini di akhir Triwulan III yaitu 100%. Dengan rencana yang akan dioperasikan salah satu terminal barang di daerah perbatasan keberhasilan ini di pengaruhi oleh adanya komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program peningkatan pelayanan angkutan barang dan penumpang

Untuk permasalahan kedepannya belum tersusunya rencana terkait penyediaan fasilitas perpindahan penumpang angkutan umum.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan yang baik
2. Melakukan Evaluasi dan Pembinaan terhadap kinerja Pelayanan.

3. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Indikator kinerja program jumlah SDP yang beroperasi pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat pada Triwulan III sebesar 50%. Pada indikator ini mengacu pada Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan yang beroperasi dalam 1 (satu) Tahun.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Triwulan III Tahun 2023

Capaian Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 pada Triwulan III sebesar 75%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian sebagai berikut :

*b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan*

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan pada triwulan III tahun 2023 memiliki persentase 75%.



c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

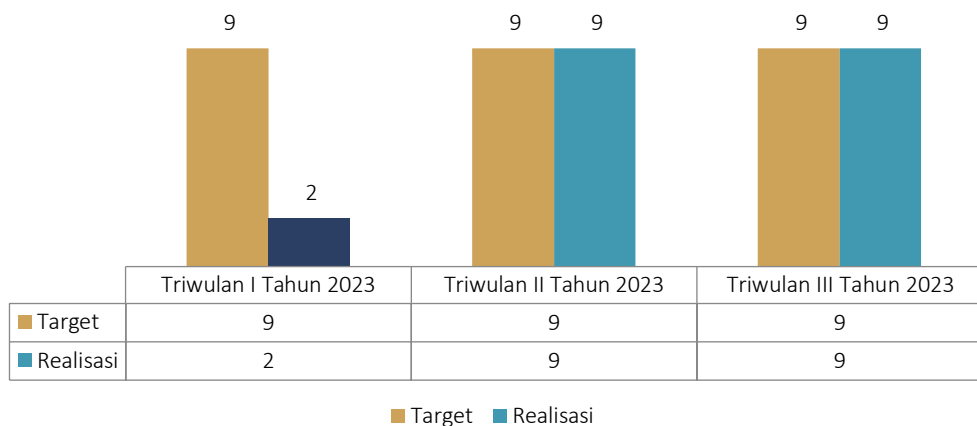
BPTD Kelas II Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

4. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

Indikator kinerja program jumlah SDP yang beroperasi pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat pada Triwulan III sebesar 100%. Pada indikator ini mengacu pada jumlah Penyeberangan SDP yang beroperasi dalam 1 (satu) Tahun.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2023

Capaian Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 pada Triwulan III sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian sebagai berikut :



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 pada angkutan penyeberangan sebelumnya di lintas utama adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dikarenakan beberapa faktor

1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan tiap minggu oleh Staf teknis TSDP
2. Pemeriksaan Kapal secara rutin dan Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;



3. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis.

c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di BPTD Kelas II Kalimantan Barat, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan dan Pembenahan Fasilitas Prasarana yang ada di dermaga penyeberangan.
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
4. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;
5. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Tabel II. 3 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA				TRIWULAN III		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK2	Menigkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100%
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	90	90	90	100%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dipelabuhan SDP	%	90	90	90	50%



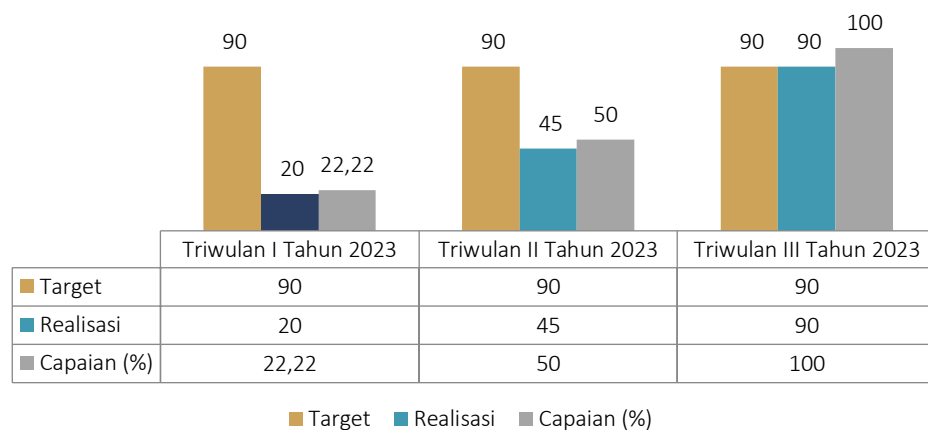
1. IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

a. *Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2023*

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di terminal tipe A dihitung berdasarkan Penilaian publik atas penyelenggaraan yang didapatkan dari hasil penilaian masyarakat terhadap pelayanan Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal di terminal tipe A.

Proses perumusan meliputi:

- 1.Aspek Penilaian;
- 2.Pembobotan Nilai;
- 3.Parameter;
- 4.Jumlah responden (sampling metode).



b. *Analisa Keberhasilan/Kegagalan*

Persentase Pelaksanaan Standar Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat pada triwulan III Tahun 2023 sudah mendapat capaian 100% dari target 90% pada PK Tahun 2023 artinya BPTD Kelas II Kalimantan Barat telah melampaui target PK 1 (Satu) tahun.

c. *Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang*

1. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik;
2. Kenyamanan dilokasi pemberhentian dilokasi pemberhentian terminal bangunannya harus memadai dan bersih;
3. Keselamatan dan keamanan penumpang harus di perhatikan;



4. Kemudahan menemukan lokasi fasilitas terminal penumpang;

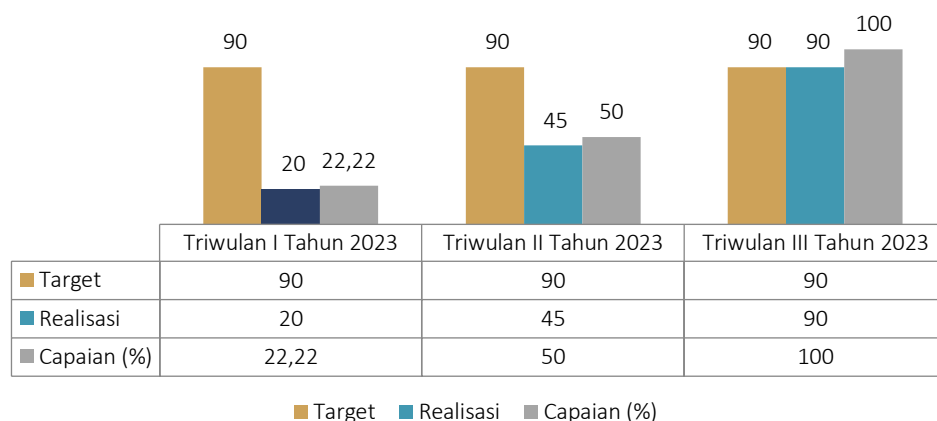
2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

Indikator kinerja Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat pada tahun 2023 capainnya dihitung dari tersedianya pelabuhan sungai dan Danau yang melayani kapal yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah Kalimantan Barat.

a. *Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2023*

Capaian kinerja persentase pelaksanaan standar pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan pada triwulan III tahun 2023 senilai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut :



b. *Analisa Keberhasilan dan Kegagalan*

Dari Hasil capaian kinerja Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di pelabuhan SDP Triwulan III Tahun 2023 adalah 90%. Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja kita mencapai 100%.

c. *Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang*

Upaya untuk meningkatkan Presentase pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di pelabuhan SDP, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan bekal untuk memastikan pelaksanaan SOP dan SPM khususnya terkait pencapaian.



2. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan.

II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam rangka capaian kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat penilaiannya dilakukan berdasarkan progress keuangan terakhir.

Tabel II. 4 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN III		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat			65%		
IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	600	75%
IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen perhubungan darat	%	80	80	60	75%
IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600	600	0	0%
IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	75	75%
IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelataran SDP	Lokasi	3	3	3	100%

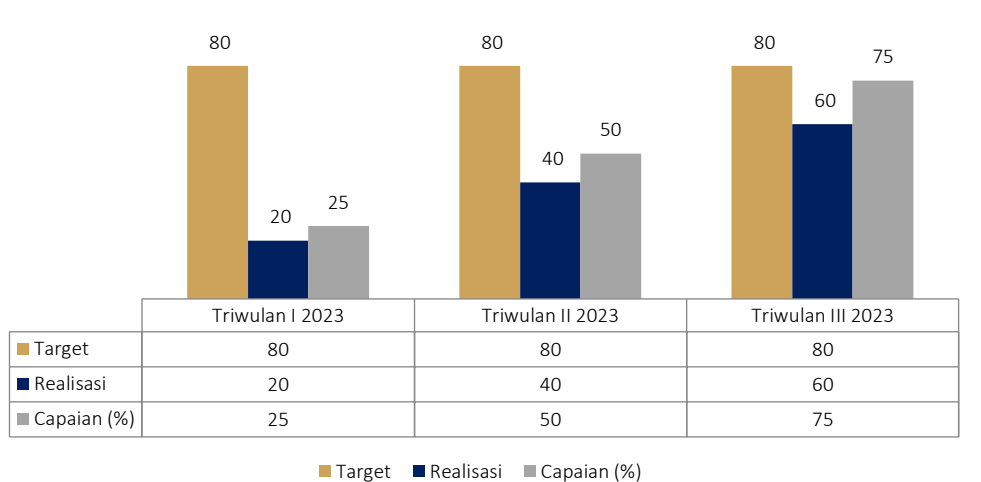


1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

Indikator kinerja kegiatan merupakan suatu ukuran dari suatu tujuan dari sasaran strategis Balai Pengelola Transportasi Darat. keberhasilan Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada indikator ini menerapkan sistim perbandingan Capaian kinerja yang telah terealisasi.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Capaian kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan III tahun 2023 mencapai 75%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut :



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, Pada Triwulan III realisasi kinerja mencapai 60% atau dengan capaian 75% dari target 80%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{60}{80} \times 100\% = 75\%$$

c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan evaluasi pada penerapan pemasangan yang telah dilaksanakan
2. Melakukan pemeliharaan pada perlengkapan jalan yang telah terpasang



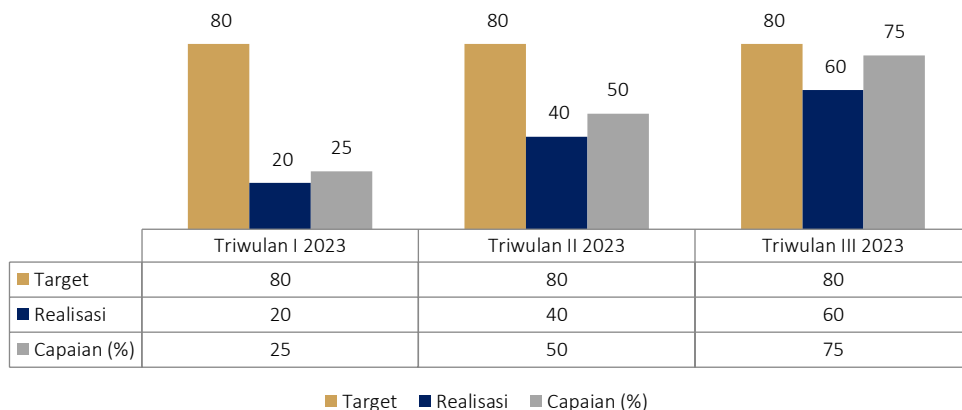
3. Melakukan Peningkatan Perlengkapan jalan yang ada di jalan Nasional.

2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

Pada indikator ini menggambarkan keberhasilan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat. Indikator ini juga digunakan sebagai dasar pembobotan apabila terlaksananya kegiatan persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2023

pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2023 Persentase sebesar 60%, jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 80%. Maka capaian kinerja pada saat ini 75%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian Kinerja.



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari Hasil Jumlah Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 menunjukan bahwa progress kegiatan dalam kenaikan yang signifikan, Dengan demikian keberhasilan capaian kinerjanya yaitu :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{60}{80} \times 100\% = 75\%$$

c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB ditjen perhubungan darat pada Triwulan III Tahun 2023,

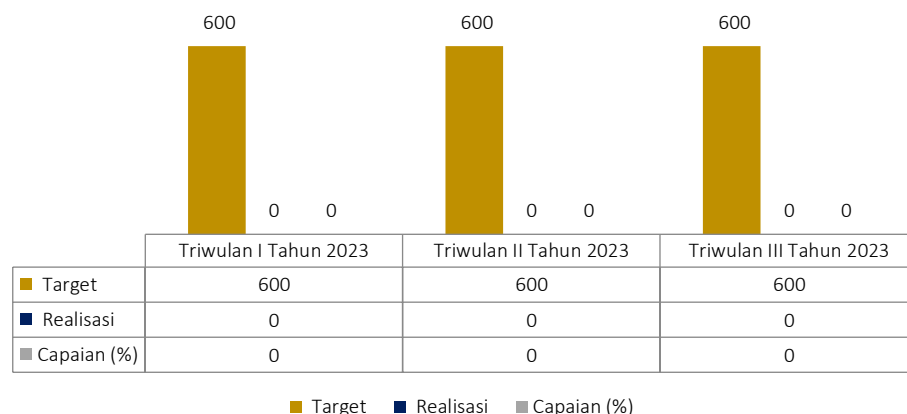


pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan untuk lebih mendorong pelaksanaan kegiatan ini
 2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan terhadap kinerja staf yang menyeluruh pada seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transporatsi Darat
 3. Melakukan Pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaannya.
3. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan
- Indikator kinerja kegiatan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Balai Pengelola Trasnportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat pada tahun 2023 telah dilakukan Rencana sosialisasi Kampanye Keselamatan Transportasi.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III

Capaian Persentase Pada Kegiatan ini belum bisa di hitung perbandingannya dikarenakan pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat Pada Triwulan III belum dilaksanakannya kegiatan ini, Namun Pada Triwulan III akan dilaksanakannya kegiatan ini dengan melakukan sosioalisasi terhadap masyarakat yang di Kalimantan Barat. Sehingga Pada Tabel Capaian Dan Realisasi Masih 0%.



A



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Di jelaskan pada Tahun 2023 baru akan dilakukannya kegiatan ini, pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat akan melaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar. Pada pencapaiannya di triwulan III masih dengan 0% dikarenakan jadwal kegiatan ini akan dilakukan pada Triwulan IV, sehingga Capaiannya masih 0%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{600} \times 100\% = 0\%$$

c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

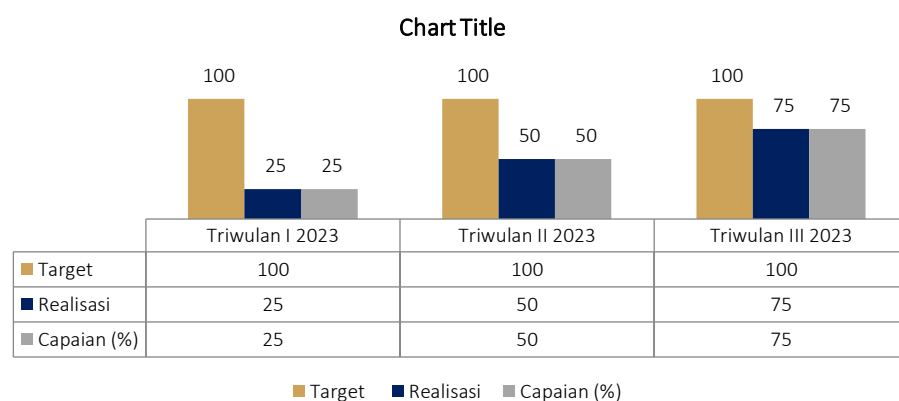
Adapun Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat
2. Meningkatkan Pemahaman Tentang Aturan Keselamatan Transportasi

4. IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
Capaian kinerja standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dihitung berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat pada Tahun 2023.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III

Capaian kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan III tahun 2023 75%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut :





b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Bedasarkan penilaian tahun 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat, menargetkan sasaran yang pelaksanaannya sangat bermanfaat

$$\% \text{ Capaian} = \frac{75}{100} \times 100\% = 75\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja ini di Tahun 2023 yaitu sebesar 75%.

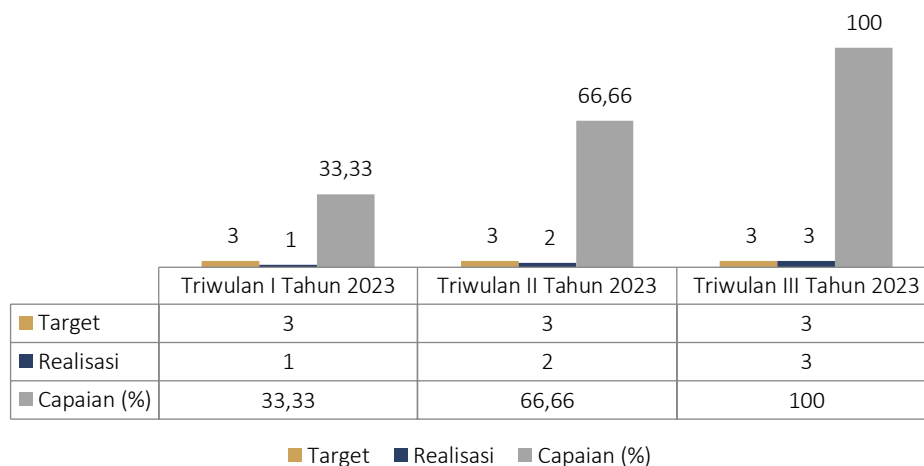
c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

1. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaannya
2. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan dan Target yang terealisasi.
3. Melaksanakan Akreditasi Unit Pelaksanaan Kendaraan Bermotor.

5. IKK 7.b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP
Indikator Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP merupakan persentase jumlah rambu sungai yang terpasang dalam wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 sebesar 3 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 3 lokasi maka capaian kinerja pada Triwulan III mencapai 100%.





b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, Pada Triwulan III capaian kinerja mencapai 2 lokasi atau dengan capaian 100% dari target 3 lokasi.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan pengawasan harian dan bekala untuk memastikan pelaksanaan progress pekerjaannya.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan koordinasi mengenai ketersediaan fasilitas keselamatan alurnya.

II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Tabel II. 5 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA				SATUAN	TARGET	TRIWULAN III		
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					77,77%		
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	90	70	77,77%		

1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Capaian Kinerja Pada Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dilihat sebagaimana kualitas tingkat Penyelenggaraan dan Pelayanan ini berlangsung.

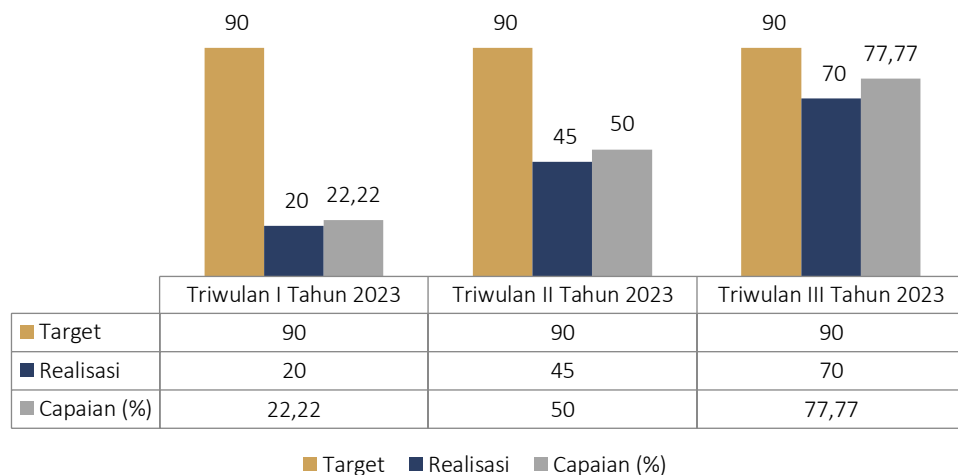
Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan teknis Transportasi Darat tahun 2023 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Darat 2020-2024 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 90 dengan target 90 maka capaian kinerja mencapai 90%. Jadi realisasi pada tahun 2022 tetap sama pada tahun 2023 yaitu 90.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III

Capaian Tingkat Kualitas Penyelenggaraan dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 Triwulan III sebesar 90 jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 90 maka capaian kinerja Pada Triwulan III mencapai 77,77%. Pencapaian ini digambarkan sbb :



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Bedasarkan penilaian tahun 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, menargetkan sasaran yang pelaksanaannya sangat bermanfaat.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{70}{90} \times 100\% = 77,77\%$$

Dengan demikian keberhasilan Capaian kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Pada Tahun 2023 Triwulan III sebesar 50%.

c. Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang akan Datang

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :



1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan tingkat penyelenggaraan perkantoran di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat.
2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan penilaian yang menyeluruh pada seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat
3. Melakukan Pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan kegiatannya

II.2.5 SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

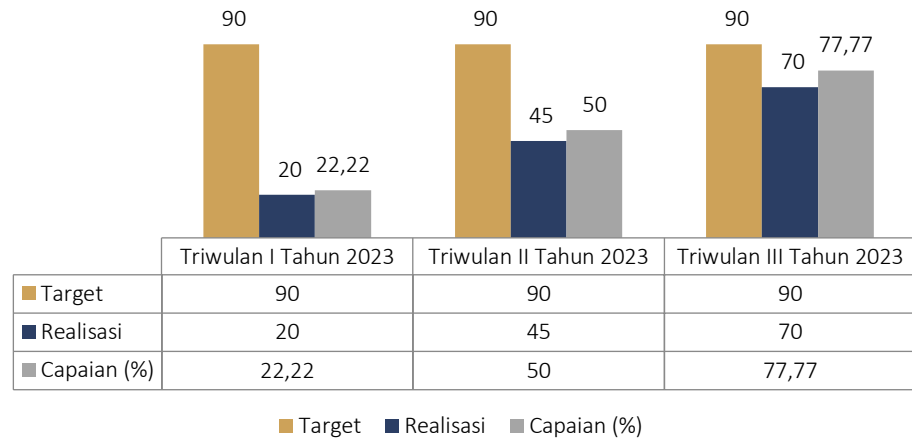
Tabel II. 6 SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	TRIWULAN III		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					77,77%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	70	77,77%

1. IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
Capaian kinerja Penyelenggaraan Perkantoran BPTD dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan kualitas perencanaan, pelayanan dan Realisasi kegiatan Layanan Perkantoran.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Triwulan III

Capaian Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 sebesar 45 jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut:



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Bedasarkan penilaian tahun 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, menargetkan sasaran yang pelaksanaannya sangat bermanfaat.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{70}{90} \times 100\% = 77,77\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja utama pada Tahun 2023 yaitu sebesar 50%.

c. Upaya untuk meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan tingkat penyelenggaraan perkantoran di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat.
2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan penilaian yang menyeluruh pada seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat.
3. Melakukan Pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Tabel II. 7 Alokasi Anggaran Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	99.228.909.000	60.305.543.548	60.77 %
3	Belanja Modal	62.366.338.000	40.061.871.707	64.24 %
TOTAL		161.595.247.000	100.367.415.255	62.11%

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023

RM	Rp	138.979.975.000	75%
PNBP	Rp	46.792.435.000	25%
SBSN	Rp	-	-
Total	Rp	185.772.410.000	100%

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp	-	0,00%
Belanja Barang	Rp	99.439.940.000	54%
Belanja Modal	Rp	86.332.470.000	46%
Total	Rp	185.772.410.000	100%

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat melakukan Revisi Anggaran Sebanyak 1 (Satu) kali dalam Triwulan III Tahun 2023 dengan tema Revisi Pergeseran Anggaran dalam satu program yang sama dalam rangka penyesuaian pagu kebutuhan dalam satu akun dan revisi redaksi serta nama lokasi kegiatan dan Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan.



2. Refocusing Anggaran Tahun 2023

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023

RM	Rp	138.872.812.000	75%
PNBP	Rp	22.722.435.000	25%
SBSN	Rp	-	-
Total	Rp	161.595.247.000	100%

b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp	-	0,00%
Belanja Barang	Rp	99.332.777.000	54%
Belanja Modal	Rp	62.262.470.000	46%
Total	Rp	161.595.247.000	100%

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan kegiatan tahun 2023

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi anggaran Triwulan III dari tahun 2020 – 2022 pada untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2023

No	Tahun	Pagu awal	Pagu akhir	Realisasi	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2020	163.051.872.000	163.051.872.000	-	0,00%
2	2021	118.140.491.000	118.140.491.000	-	0,00%
3	2022	113.810.793.000	113.810.793.000	3.330.581.207	2,93%
4	2023	185.772.410.000	161.595.247.000	91.573.739.882	56,67%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap per Triwulan III. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdata untuk realisasi triwulan III, Tahun 2022 terdapat peningkatan dengan anggaran yang terserap sebesar **Rp.63.429.173.546,-** atau mencapai **55,73%** dari pagu akhir **Rp.113.810.793.000,-**. Tahun 2023 terdapat peningkatan kembali dengan anggaran terserap sebesar **Rp. 91.573.739.882,-** atau mencapai **56,67%** dari pagu akhir sebesar **Rp. 161.595.247.000**



II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II. 9 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode	Nomenklatur Program	Pagu Awal	Pagu Per-Triwulan III	Triwulan III	
				Realisasi	%
022.03GA	Program Infrastruktur Konektivitas	177.539.072.000	105.955.809.000	57.379.132.971	54,15%
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	61.554.566.000	53.599.541.000	32.605.520.200	60,83%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	30.196.154.000	22.910.196.000	10.274.280.090	44,85%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	78.845.804.000	25.683.510.000	11.669.832.079	45,44%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	6.942.548.000	3.762.562.000	2.829.500.602	75,2%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	8.233.338.000	7.854.984.000	6.050.040.575	77,02%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	313.464.000	313.464.000	248.638.250	79,32%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.919.874.000	7.854.984.000	6.050.040.575	77,02%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 91.573.739.882,-** atau mencapai **56,67%** dari total pagu sebesar **Rp. 161.595.247.000**



2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan III, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Alokasi (TW III)	Realisasi (TW III)	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	-	-	0,00%
2	Belanja Barang	99.332.777.000	53.514.549.437	53,87%
3	Belanja Modal	62.262.470.000	38.059.190.445	61,13%
Total		161.595.247.000	91.573.739.882	56,67%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2023 Per Jenis Belanja adalah sebesar **Rp. 91.573.739.882,-** atau mencapai **56,67%** dari total pagu sebesar **Rp. 161.595.247.000**

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per Sumber Belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan III, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 11 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

No	Sumber Dana	Pagu Alokasi (TW III)	Realisasi (TW III)	
			Rp	%
1	RM	138.872.812.000	87.995.472.182	63,36%
2	PNBP	22.722.435.000	3.578.267.700	15,75%
3	SBSN	-	-	-
Total		161.595.247.000	91.573.739.882	56,67%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2023 Per Sumber Dana adalah sebesar **Rp. 91.573.739.882,-** atau mencapai **56,67%** dari total pagu sebesar **Rp. 161.595.247.000**



II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Tabel II. 12 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan III		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	50%	50%	-
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	50%	97,5%	-
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	50%	50%	-
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100%	208%	-
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	100%	100%	-
Total			70%	101,1%	

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata rata capaian kinerja sasaran pada triwulan III sebesar 70%, dengan realisasi anggaran sebesar 101,1%.



2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya Manusia (tabel perbandingan Jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

Tabel II. 13 Analis dan Efisiensi Penggunaan SDM

No	Satuan Pelayanan	Jumlah PNP (orang)	Jumlah PNS (orang)	Jumlah Total (orang)
1	Kantor Induk BPTD Kelas II Kalimantan Barat	51	48	99
2	Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang	65	4	69
3	UPPKB Siantan	40	6	46
4	UPPKB Sosok	9	1	10
5	UPPKB Sintang	10	4	14
6	UPPKB Satong	11	1	12
7	UPPKB Sekadau	1	0	1
8	UPPKB Singkawang	2	0	2
9	TBI Entikong	12	1	13
10	PLBN Entikong	2	0	2
11	PLBN Aruk	1	2	3
12	PLBN Nanga Badau	2	0	2
13	Pelabuhan Penyebrangan Sintete	4	0	4
14	Pelabuhan Rasau Jaya	2	0	2

3. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang ada pada Triwulan III Tahun 2023 yaitu masih banyaknya kegiatan yang belum berjalan di Triwulan III Tahun 2023 ini, itu membuat belum maksimalnya persentase capaian pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 ini



BAB III

Penutup

BAB III

PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2023 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.

III.2 Hasil Evaluasi Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Hasil Rata-rata Presentase Capaian Sasaran Program pada Triwulan III Tahun 2023 mencapai 81,6% dari 5 (Lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (Tiga Belas) Indikator Kerja Kegiatan (IKK), Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat berkomitmen pada Triwulan IV akan lebih maksimal Persentase Capaian Sasaran Programnya.



Lampiran

RENCANA KINERTA TAHUNAN TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda	Lokasi	0
		IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	0
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	9
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0
		IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80
		IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80
		IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS Dan Batas Kecepatan	Lokasi	15
		IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	600
		IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Pontianak, 24 Januari 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat



KETUT SUHARTANA, S.SiT, M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, **23** Agustus 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat

I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

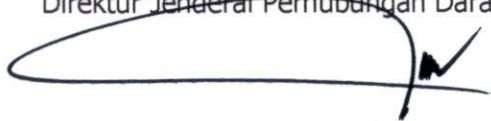
REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9
2	SK2 Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
		IKK7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan	Nilai	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dukungan Teknis Transportasi Darat	dukungan teknis transportasi darat		
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat	Nilai	90

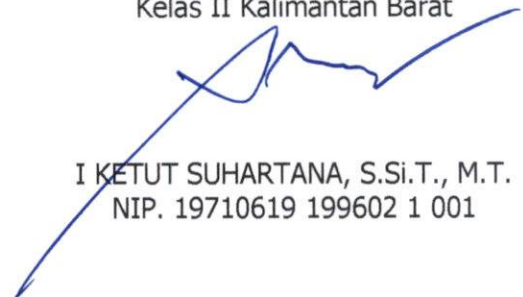
Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 61.554.566.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 30.196.154.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 78.845.804.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6.942.548.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 313.464.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.919.874.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 23 Agustus 2023
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat



I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[illegible]

		IKK.2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	7,9	13,3	20,5	25,3	25,5	35,5	40,3	45,5	65,5	75,5	85,5	90	199.250.000	Seksi TSDP
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat	IKK.3.1	Persentase Perengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan Prioritas Nasional	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	65.096.420.000	Seksi LLAJ
		IKK.3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80	Operasional UPPKB	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	5.287.544.000	Seksi Sarpras
		IKK.3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	15	Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	65.096.420.000	Seksi LLAJ
		IKK.3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0															
		IKK.3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600	keselatan dan keamanan transportasi darat	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	78.845.804.000	Seksi LLAJ
		IKK.3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (U/ECE)*	Unit	0															
		IKK.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	1,8	9,9	18,6	26,6	36,6	46,6	56,6	66,6	76,6	86,6	100	70.000.000	Seksi Sarpras
		IKK.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	Pengadaan Pemasangan Rambu Sungai Kapuas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.750.000.000	Seksi TSDP
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK.5.3	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Penunjang Teknis Transportasi Darat	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	90	6.42.548.000	Parti Kasi Espion IV
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.6.1	Tingkat Penyelenggaraan Periktoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	0	8,1	16,2	24,2	32,2	40,2	56,2	64,2	72,2	80,2	88,2	90	7.919.874.000	Kesbag TU





MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPTD WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JULI 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7		% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)
1	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IK K 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0,00	0.0%	506.640.000	0.00%	0	702.390.000	100%	100%	Seksi LLAJ
			IK K 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe-A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	2	100%	966.847.700	100%	2	638.474.666	100%	100%	Seksi Sarpras
			IK K 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	Operasional Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	8	8	100%	214.507.917	100%	8	201.793.383	100%	100%	Seksi TSDP
2	SK 2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IK K 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Monitoring dan Pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	90	0	100%	28.869.000	100%	10	28.869.000	100%	195%	Seksi LLAJ
			IK K 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	100	90	100%	7.170.000	100%	20	7.170.000	100%	141%	Seksi TSDP

3	SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IK K 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		0,00	0.0%	20.395.594.500	0.00%	0	11.912.340.520	100	100			Seksi LLAJ
			IK K 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	20	20	100%	472.493.580	100%	0	443.838.386	100%	100%			Seksi Sarpras
			IK K 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	Pembangunan ZOSS di Kalbar	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	1	0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi LLAJ
			IK K 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi		0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi LLAJ
			IK K 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	100	0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi Sarpras
			IK K 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran S D P	1	0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi TSDP
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IK K 5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	Pennunjang Teknis Transportasi Darat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100	90	100%	713.124.001	100%	10	415.996.506	100%	208%			Para Kasi Eselon IV
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IK K 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	90	90,00	100%	736.531.401	100%	10	415.996.506	100%	100%			Kasubbag TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

AGUSTUS 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)
1	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IK K 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0,00	0.0%	237.836.000	0.00%	0	0	100%	100%	Seksi LLAJ
			IK K 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe-A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	2	100%	952.179.101	100%	2	898.213.306	100%	100%	Seksi Sarpras
			IK K 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyeberangan	0	0,00	0.0%	2.583.493.000	0.00%	0	0	0,00%	0,00%	Seksi TSDP
			IK K 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	Operasional Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	8	8	100%	299.339.917	100%	8	190.965.900	100%	100%	Seksi TSDP
2	SK 2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IK K 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Monitoring dan Pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	90	0	100%	16.092.475	100%	10	16.092.475	100%	195%	Seksi LLAJ
			IK K 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring dan Pengawasan Transporatsi SDP	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	100	90	100%	25.747.000	100%	20	25.747.000	100%	141%	Seksi TSDP

3	SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IK K 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		0,00	0.0%	13.621.523.500	0.00%	0	5.980.382.675	100	100			Seksi LLAJ
			IK K 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	20	20	100%	451.694.820	100%	0	433.223.986	100%	100%			Seksi Sarpras
			IK K 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi		0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi LLAJ
			IK K 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	100	0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi Sarpras
			IK K 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran S D P	1	0,00	0.0%	550.000.000	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi TSDP
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IK K 5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	Pennunjang Teknis Transportasi Darat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100	90	100%	786.531.401	100%	10	466.531.166	100%	208%			Para Kasi Eselon IV
5	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IK K 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	90	90,00	100%	713.124.001	100%	10	466.531.166	100%	100%			Kasubbag TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

Sep-23

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)
1	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0,00	0.0%	702362000	0.00%	0	0	0%	0%	Seksi LLAJ
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe-A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	2	100%	200.341.000	100%	2	302.961.308	100%	100%	Seksi Sarpras
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyeberangan	0	0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%	Seksi TSDP
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	9	Operasional Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	8	8	100%	168.702.000	100%	8	227.137.008	100%	100%	Seksi TSDP
2	SK 2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Monitoring dan Pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	90	0	100%	66.563.025	100%	10	66.563.025	100%	195%	Seksi LLAJ
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring dan Pengawasan Transporatsi SDP	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	100	90	100%	0	0%	20	0	0%	0%	Seksi TSDP

3	SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		0,00	0.0%	16.442.670.250	0.00%	0	6.967.269.290	100	100			Seksi LLAJ
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	80	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	20	20	100%	245.677.000	100%	0	326.358.283	100%	100%			Seksi Sarpras
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi		0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi LLAJ
			IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	100	0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi Sarpras
			IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran S D P	1	0,00	0.0%	0	0.00%	0	0	0,00%	0,00%			Seksi TSDP
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	Pennunjang Teknis Transportasi Darat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100	90	100%	200.000.000	100%	10	454.900.476	100%	208%			Para Kasi Eselon IV
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	90	90,00	100%	233.748.000	100%	10	468.476.774	100%	100%			Kasubbag TU